



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

**LAPORAN KINERJA  
CAMAT JATIROTO  
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN JATIROTO**

**Jalan Gajah Mada No. 02 Telp (0334) 321 465  
JATIROTO 67355**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Kecamatan Jatiroto yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Jatiroto Tahun 2024 – 2026 guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran tahun 2024 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja pada Kecamatan Jatiroto Tahun 2024 ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan dalam pencapaian kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan efisien.

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang akan datang.

Lumajang, 15 Januari 2025

Camat Jatiroto



**KUTUM HADI KASIYAN, SH**  
NIP.19680407198903 1 006

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Gambaran Umum .....	1
1.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	1
1.1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	3
1.1.3 Sumber Daya Manusia (Sdm) Perangkat Daerah .....	8
1.1.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana .....	9
1.1.4. Isu Strategis.....	12
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>16</b>
2.1. Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	16
2.2. Perjanjian Kinerja tahun 2024 .....	18
2.3 Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU .....	19
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>30</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	30
3.1.1. Pengukuran Kinerja .....	30
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja .....	32
3.1.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .	32
3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya .....	34
3.1.2.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra 2020-2024 .....	37
3.1.2.4. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Kecamatan Yosowilangun.....	38
3.1.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan .....	39
3.1.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	40
3.1.2.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja ....	42
3.2. Realisasi Anggaran .....	47
3.2.1. Inovasi .....	48
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>50</b>

## DAFTAR TABEL

Halaman

### TABEL I

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai .....	8
Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana pertanggal 31 Desember 2024 .....	9

### TABEL II

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatiroto .....	16
Tabel 2.2 Dokumen Rencana Kinerja kecamatan jatiroto Tahun 2024 .....	17
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	18
Tabel 2.4 Program dan kegiatan yang mendukung IKU .....	19

### TABEL III

Tabel 3.1 Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja .....	31
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2024 .....	31
Tabel 3.3. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024. Kecamatan Jatiroto .....	32
Tabel 3.4 Perbandingan capaian kinerja dari Tahun 2019 – 2023 .....	35
Tabel 3.5 Capaian Kinerja dari Tahun 2024 .....	36
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target Akhir Renstra 2024-2026 .....	37
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Kecamatan Yosowilangun .....	38
Tabel 3.8 Efisiensi penggunaan Sumber Daya .....	40
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	47

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

**Gambar 1**

Struktur Organisasi Kecamatan Jatiroto ..... **2**

**Gambar 2**

Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun ke Tahun ..... **36**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja di setiap perangkat daerah berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Waktu penyampaian laporan kinerja paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi.

Kecamatan Jatiroto menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 secara sistematis untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan penggunaan 1 anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

### **1.1. GAMBARAN UMUM**

#### **1.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja/ Kecamatan Jatiroto, Dinas/ Badan/ Kecamatan Jatiroto. merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang

dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

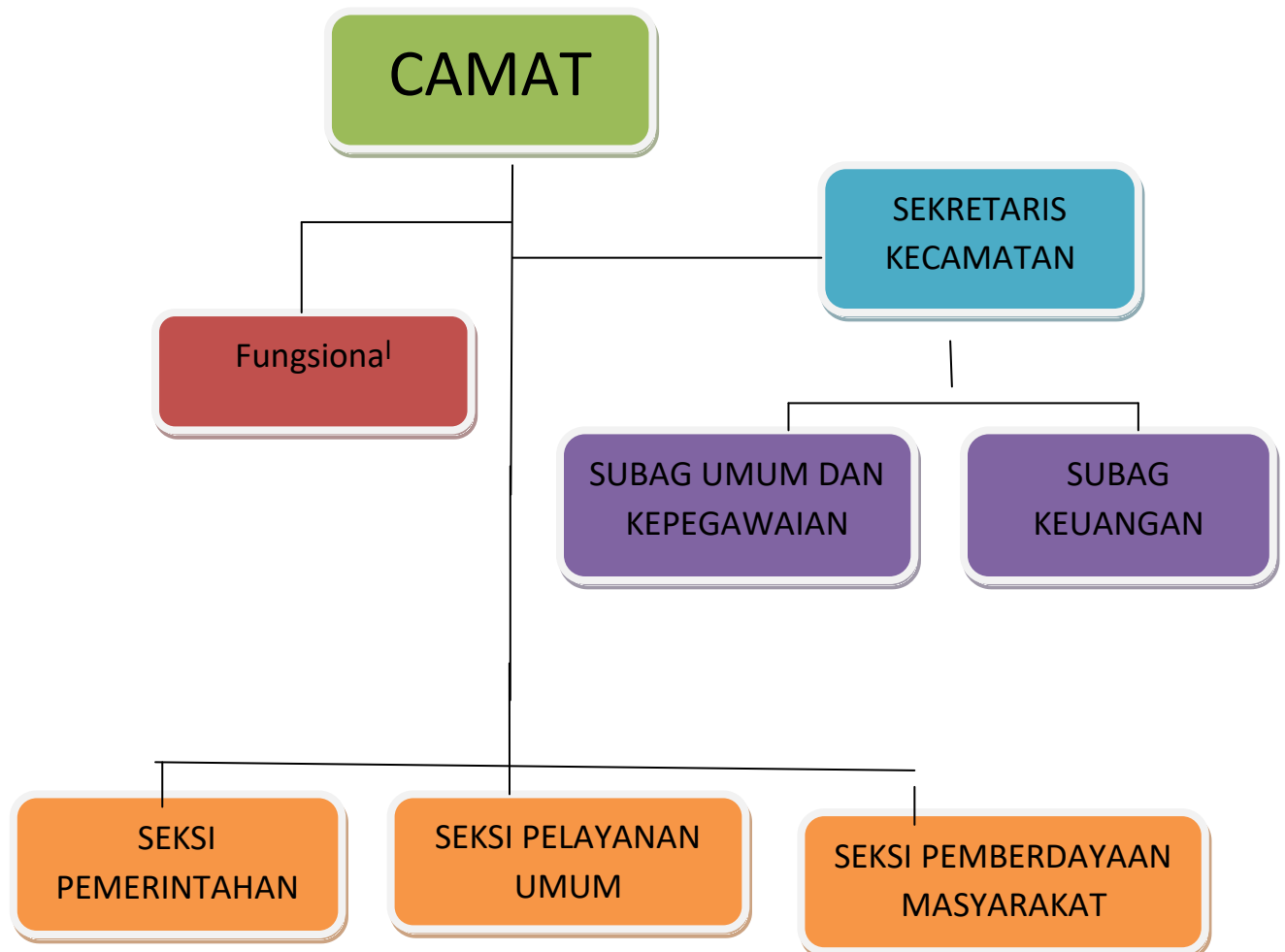
Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, susunan organisasi Kecamatan Jatiroto terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretariat membawahi :
  - a. Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Bagian Keuangan
3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Kasi Pelayanan umum
5. Kasi Pemerintahan

Adapun bagan struktur organisasi dari Kecamatan Jatiroto adalah sebagaimana berikut:

GAMBAR 1

Struktur Organisasi Kecamatan Jatiroto



Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan Jatiroto, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Jatiroto adalah sebagai berikut:

### **1.1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah :**

#### **Tugas Pokok Camat**

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum.
2. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengkoordinasikan penererapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan dan sarana pelayanan umum
6. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan Pemerintah yang dilakukan oleh perangkat Daerah tingkat Kecamatan.
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa
8. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan.
9. Melaksanakan sebagai Kewenangan Bupati yang dilimpahkan.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Tugas Pokok Sekretaris Kecamatan**

1. Penyusunan kerja Sekrestaris Kecamatan
2. Pengoordinasian penyusun rencana program dan kegiatan Kecamatan
3. Pengelolaan Administrasi umum, lepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan.
4. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan.
5. Pernyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana.
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan.
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada camat
8. Pelaksanaa fungsi lain yang diberikan oleh camat.

#### **Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum Kepegawaian.
2. Melaksanakan Penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program kegiatan kecamatan
3. Menyusun rencana dan pengembanga Kecamatan.
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan.



5. Melakukan pembanguanan dan pemeliharaan sarana prasarana kecamatan.
6. Melakukan administrasi kepegawaian;
7. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
8. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
9. Melakukan administrasi barang milik daerah;
10. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
11. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
12. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang – undangan;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
15. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

#### **Tugas Pokok Sub Bagian**

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
3. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
4. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategis/ Renstra, Rencana Kerja / Renja, laporan akuntabilitas kinerja Instansi / LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat);
5. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
6. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
7. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
8. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dang anti rugi;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program Sub Bagian Keuangan;
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
11. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

#### **Tugas Pokok Seksi Pemerintahan**

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideology Negara dan kesatuan bangsa;
4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang – undang;
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
8. undangan;
9. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
10. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di Kecamatan;
11. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang- undangan lainnya diwilayah kerjanya;
12. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintan ditingkat Kecamatan;
13. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
14. Melaksanakan fasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa;
15. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan asset desa;
16. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
17. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
18. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
19. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
20. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

21. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
22. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
23. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
24. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat ;
25. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **Tugas Pokok Seksi Pelayanan Umum**

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Umum;
3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku ;
4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Kecamatan;
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah Kecamatan;
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Pelayanan Umum;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
10. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Camat.

#### **Tugas Pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa**

1. Menyusun Rencana Kegiatan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
4. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;

5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa / kelurahan diwilayah kecamatan;
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan diwilayah kecamatan;
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan;
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayahnya;
13. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
16. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat..

### 1.1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Kecamatan Jatiroto didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 17 orang (kondisi per 1 Desember 2024), dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Tabel Komposisi Pegawai**

No	Jabatan Dalam Organisasi	Jenis Kelamin		Status Kepegawaian			Ijazah							Eselon			Ket.	
		L	P	PNS	P3K	TKB	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	2	3	4		
1.	Camat	1		1							1					1		
2.	Sekretaris	1		1							1					1		
3.	Subag Umum		1 plt	1							1							
4.	Sub Bagian Keuangan	1		1						1								
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	1		1							1							
6	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1		1						1								
7	Kepala Seksi Pelayanan Umum	1		1						1								
8.	Pejabat Fungsional																	
9.	Pejabat Pelaksana	3	2	5						2	1	1						
10	Tenaga Kontrak	5				5				3		2						
Jumlah		14	3	12		5				7	2	6						

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, total pegawai Kecamatan Jatiroto. per 31 Desember 2024 sebanyak 17 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 7 orang, pejabat fungsional sebanyak 0 orang, pejabat pelaksana sebanyak 5 orang, pejabat PNS sebanyak 12 orang, PPPK sebanyak 0 orang dan tenaga kontrak sebanyak 5 orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan pada sebesar 87,5% : 12,5% dengan pegawai laki-laki sebanyak 14 orang dan perempuan sebanyak 3 orang.

#### 1.1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Jatiroto selain didukung oleh sumber daya manusia juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Adapun sarana prasarana pendukung yang tersedia pada Kecamatan Jatiroto disajikan pada tabel 2.2 di bawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2024**

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang
1.	GENSET / Generating Set	unit	1	Rusak berat
2.	Mobil	unit	1	Baik
3.	Sepeda Motor	unit	6	Baik
4.	Sepeda Motor	unit	2	Rusak berat
5.	Tripod	unit	1	Baik
6.	Mesin ketik	unit	1	Rusak berat
7.	Lemari besi sleding kaca	unit	2	Baik
8.	Lemari besi 2 pintu	unit	2	Baik
9.	Lemari arsip besi 2 pintu	unit	1	Baik
10.	Rak besi	unit	1	Baik
11.	Filing kabinet	unit	2	Baik
12.	Filing kabinet	unit	4	Rusak berat
13.	Brand kas	unit	1	Baik
14.	Lemari kaca	unit	3	Baik
15.	Lemari tempat koran	unit	1	Baik
16.	Kotak saran	unit	1	Baik
17.	LCD – Proyektor /OHP	unit	1	Rusak berat
18.	Papan Data Monografi	unit	4	Rusak berat
19.	Papan struktur organisasi	unit	1	Rusak berat
20.	Punc Card	unit	1	Rusak berat
21.	NEON BOX	unit	1	Rusak berat
22.	LED DISPLAY	unit	1	Baik
23.	Mesin laminating	unit	1	Rusak berat

24.	Lemari Kayu	unit	2	Baik
25.	LEMARI ARSIP/BACKDROP	unit	1	Baik
26.	Almari/lemari	unit	3	Rusak berat
27.	KURSI BESI	unit	1	Rusak berat
28.	KURSI BESI	unit	2	Baik
29.	Kursi Tamu/Zice	unit	1	Rusak berat
30.	Meja kursi tamu	unit	1	Baik
31.	Meja rapat	unit	3	Baik
32.	Meja podium	unit	1	Baik
33.	Meja pelayanan	unit	1	Baik
34.	Meja pelayanan	unit	1	Rusak berat
35.	Kursi tamu camat	unit	1	Baik
36.	Kursi staf	unit	5	Rusak berat
37.	Meja komputer	unit	1	Rusak berat
38.	Kursi tunggu	unit	1	Rusak berat
39.	Meja komputer	unit	1	Baik
40.	Meja kayu	unit	5	Baik
41.	Meja kayu	unit	3	Rusak berat
42.	GORDEN	unit	1	Baik
43.	VACUM CLEANER	unit	1	Baik
44.	Mesin pemotong rumput	unit	1	Rusak berat
45.	AC/Air Conditioner	unit	4	Rusak berat
46.	AC/Air Conditioner	unit	5	Baik
47.	Kipas angin	unit	3	Rusak berat
48.	Televisi	unit	2	Rusak berat
49.	Televisi	unit	2	Baik
50.	Soundsystem	unit	1	Kurang baik
51.	Wireless Audio Visual	unit	1	Rusak berat
52.	UPS	unit	8	Rusak berat
53.	Meja Eselon III	Buah	1	Rusak berat
54.	Meja kerja pejabat eselon IV	Buah	8	Kurang baik
55.	Kursi eselon III	Buah	1	Rusak berat
56.	Kursi kerja pejabat eselon IV	Buah	8	Rusak berat
57.	Kursi tunggu busa	Buah	2	Baik
58.	Meja rapat	Buah	2	Baik
59.	Kursi rapat	buah	30	Baik
60.	Lemari es	Buah	1	Baik
61.	Lemari es	Buah	1	Kurang baik
62.	Sound sitem siaran keliling	Buah	1	Baik

63.	Wireless Sound Sistem	Unit	1	Baik
64.	Dispenser	Unit	1	Rusak berat
65.	Alat Pemadam Kebakaran	Buah	2	Rusak berat
66.	Tempat Tidur	Buah	1	Baik
67.	Almari	Buah	1	Baik
68.	Mesin cuci	Buah	1	Rusak berat
69.	Kompot gas	Buah	1	Rusak berat
70.	Rak piring	Buah	1	Baik
71.	Tangga aluminium	Buah	1	Baik
72.	Karpet	Buah	10	Baik
73.	LCD-Proyektor / OHP	Unit	1	Baik
74.	Kursi staf	Unit	6	Baik
75.	Tempat Tidur SpringBed	Unit	2	Baik
76.	Kursi dan Meja Makan	Unit	1	Baik
77.	Lemari Pakaian	Unit	1	Baik
78.	Kursi dan Meja Tamu	Unit	1	Baik
79.	Kipas Angin	Unit	2	Baik
80.	Megaphone	Unit	1	Baik
81.	Tempat sampah 3 in 1	Unit	1	Rusak berat
82.	Meja Pelayanan	Unit	1	Baik
83.	Kursi Pelayanan/Kursi Besi	Unit	1	Baik
84.	Kursi Pelayanan/Kursi Besi	Unit	1	Kurang baik
85.	Televisi	Unit	1	Baik
86.	Tandon Air Plastik	Unit	1	Baik
87.	Radio Ratel	Unit	1	Rusak berat
88.	Faximile	Unit	2	Rusak berat
89.	Komputer PC	Unit	1	Kurang baik
90.	Modem	unit	1	Rusak berat
91.	PEMBERSIH lantai	Buah	1	Baik
92.	Pengharum ruangan	Buah	1	Baik
93.	Tisu	Buah	52	Baik
94.	Cikrak plastik	Buah	4	Baik
95.	Timba	Buah	5	Baik
96.	Kain pel biru	Buah	5	Baik
97.	Kamper bola	pak	10	Baik
98.	Kanibo	pcs	3	Baik



#### **1.1.4 ISU STRATEGIS**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan Jatiroto di periode mendatang.

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Kecamatan Jatiroto dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah diantaranya :

##### **1. Pemasalahan pelayanan perangkat Daerah**

Tujuan dari oerumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai factor yang mempengaruhi keberhasilan /kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu,khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah. Suatu permasalahan daerah memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah(RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD), termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/ provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahana dipetakan menjadi masalah pokok,masalah dan akar masalah.

Masalah pokok yang dialami oleh Perangkat Daerah Kecamatan Jatiroto yaitu kurang terpenuhinya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa. Dari masalah pokok ini selanjutnya diidentifikasi masalah dan akar masalah untuk peneruan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

a) Faktor Masalah

1. Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi
2. Akuntabilitas Pemerintahan Desa

b) Akar Masalah

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan.
2. Sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya memadai
3. Kapasitas SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah kurang memadai.
4. Belum optimalnya verifikasi penata usahaan keuangan SKPD.
5. Pengelola BMD belum optimal.
6. Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi kependudukan belum sepenuhnya memadai.
7. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan.
8. Terbatasnya sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
9. Proses perencanaan pembangunan Desa belum optimal.
10. Penyelenggaraan kelembagaan BUMDes belum optimal.
11. Kurangnya Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Peningkatan partisipasi Masyarakat.
12. Kurangnya pemahaman pemerintahan desa terhadap indicator desa maju dan mandiri.
13. Belum optimalnya implementasi perencanaan pembangunan yang responsive gender.
14. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa.
15. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa.

16. Masih rendahnya peran perempuan dalam partai politik, pemerintahan dan lembaga perekonomian.

**2. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Indikator Tujuan**

- a. Prosedur yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditampilkan;
- b. Masyarakat ada yang belum mengetahui tentang SOP Pelayanan;
- c. Pihak Desa yang belum sepenuhnya mengeti tentang prosedur pelayanan publik kepada masyarakat;
- d. Kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan Jatiroto yang belum kondusif;

**3. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran**

- a. Wilayah Kecamatan Jatiroto sebagian besar adalah tanah HGU, dalam hal penertiban wilayah, kebersihan dan lainnya belum optimal;
- b. Dalam hal melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana tidak bisa semerta - merta bisa dilaksanakan, harus ada ijin dari Direksi PTPN XI
- c. Proses perencanaan kegiatan dan anggaran di Desa yang belum optimal
- d. Proses pelaporan anggaran dan kegiatan di Desa yang terlambat
- e. Keterlambatan pertanggungjawaban administrasi keuangan Desa.

**4. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan public di Kecamatan	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan
Sarana dan Prasarana Pelayanan yang belum sepenuhnya memadai			
Kapasitas SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah kurang memadai			
Belum optimalnya verifikasi penatausahaan keuangan SKPD			
Pengelolaan BMD belum optimal			
Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi kependudukan belum sepenuhnya memadai			
Rendahnya kesadaran mesyarakat untuk melaporkan peristiwa penting			

			kependudukan
			Terbatasnya sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2		Akuntabilitas pemerintahan desa	Proses perencanaan pembangunan desa belum optimal
			Penyelenggaraan kelembagaan BUMDesma belum optimal
			Kurangnya Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan peningkatan partisipasi masyarakat
			Kurangnya pemahaman pemerintahan desa terhadap indicator desa maju dan mandiri
			Belum optimalnya implementasi perencanaan pembangunan yang responsive gender
			Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa
			Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa
			Masih rendahnya peran perempuan dalam partai politik, pemerintahan dan lembaga perekonomian

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta *mandat (core business)* yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan.

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 100.3.3.2/571/427.12/2023 tentang Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Jatiroto disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatiroto

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Angka	Hasil penghitungan Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Bag. Organisasi
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	$\frac{\text{Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi}} \times 100\%$	Seluruh Seksi dan Seluruh Sub bagian
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata - Rata Persentase Desa yang menyusun dokumen	Persen	Jumlah Desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun APBDesa tepat waktu+ Jumlah Desa yang	Seksi Pemerintahan

		administrasi pemerintahan desa tepat waktu		menyusun RKPDesa tepat waktu) _____x100% Jumlah Seluruh Desa diwilayah Kecamatan x 3 Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa	
--	--	--	--	---	--

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatiroto sebagaimana telah dicantumkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Kecamatan disajikan pada

Tabel 2.2

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	61,50(B-)
<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>		
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	87,72%
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata - Rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	94,44%

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renja dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Di Kecamatan Jatiroto Tahun 2024 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Jatiroto.Tahun 2024.

Adapun perjanjian Kinerja Kecamatan Jatiroto adalah

**Tabel 2.3**  
Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Jatiroto  
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	87,72%	87,72%
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata - Rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	88,89%	94,44%
3.				

No	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1.743.266.949.00	1.707.501.397.00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik	9.000.000.00	2.250.000.00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	144.655.000.00	41,875.000.00
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	24.355.000.00	3.520.000.00
5	Program Penyelenggaraan	7.200.000.00	7.200.000.00

	Urusan Pemerintahan Umum		
6	Program Pembinaan Dan Pengawassan Desa	25.590.000.00	15.990.000.00
	<b>Jumlah</b>	1.954.066.949.00	1.778.336.397.00



### 2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG IKU (KINERJA DAN ANGGARAN)

Dalam mencapai target sasaran strategis Indikator Kinerja Utama yang tertuang di perjanjian kinerja Kecamatan Jatiroto tersebut, kinerja program dan kegiatan yang mendukung dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU**  
**Tahun 2024**

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2024		Perubahan 2024	
			Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Tujuan 1 Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	61,50	1.954.066.949,00	61,50	1.778.336.397,00
1	<b>Sasaran 1</b> <b>Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan</b>	1. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	87,72	1.752.266.949	87,72	1.709.760.397
<b>A</b>	<b>Program 1</b> <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah</b>	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100%	1.823.606.128	100%	1,707,510,397
	<b>Kegiatan 1</b> Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100%	12.451.000	100%	2.100.00
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.993.000	2 dokumen	900.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen	3.008.000	1 dokumen	1.200.000

		Dokumen RKA-SKPD				
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dpkumen	450.00	-	0
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	3.000.000	-	0
	<b>Kegiatan 2</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Pemenuhan pelaporan administrasi keuangan Perangkat daerah	100%	1.373.392.297	100%	1.379.224.795
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 orang /12 bulan	1.345.397.279.	11 orang /12 bulan	1.353.029.309
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	24.395.000	12 dokumen	20.475.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	1.800.000	12 dokumen	1.800.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan	5 laporan	1.800.000	5 laporan	1.800.000

		Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				
	<b>Kegiatan 3</b> Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	1.800.000	-	0
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	900.000	-	0
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan Barang Milik Daerah	12 laporan	900.000	-	0
	<b>Kegiatan 4</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	80.345.652	100%	63.173.152
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	2.499.276	1 paket	2.499.276
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	31.606.606	2 paket	31.606.606
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 paket	8.849.770	2 paket	9.067.270
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	400.000	12 laporan	400.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat	Jumlah laporan	12 laporan	33.390.000	12 laporan	19.600.000

	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				
	<b>Kegiatan 5</b> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	40.829.177	-	0
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 unit	40.829.177	-	0
	<b>Kegiatan 6</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	228.128.000	100%	214.588.250
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 laporan	48.440.000	3 laporan	48.440.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	178.686.000	12 laporan	166.148.250
	<b>Kegiatan 7</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi Pemeliharaan BMD	100%	86.660.000	100%	46.815.200
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	32.850.000	8 unit	32.315.200
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan	Jumlah peralatannya	22 unit	14.300.000	22 unit	14.300.000

	dan Mesin lainnya	dan mesin lainnya yang dipelihara				
	<b>Kegiatan 8</b> Pemeliharaan Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		100%	39.510.000	-	0
<b>B</b>	<b>Program 2</b> <b>Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP</b>		9.000.000		2.250.000
	<b>Kegiatan 1</b> Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100%	4.500.000	100%	2.250.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 dokumen	4.500.000	6 dokumen	2.250.000
	Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	6 dokumen	4.500.000	-	0
<b>C</b>	<b>Program 3</b> <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat</b>	100%	144.655.000	100%	41.875.000
	<b>Kegiatan 1</b> Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	119.756.000		24.625.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum	9 lembaga kemasyarakatan	1.500.000	-	0

		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				
	Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	1 dokumen	5.775.000	1 dokumen	5.775.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	10 laporan	112.480.000	10 laporan	18.850.000
	<b>Kegiatan 2</b> Kegiatan Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%	24.900.000	100%	17.250.000
	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	150 keluarga	15.900.000	150 keluarga	9.750.000
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	"Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	150 keluarga	1.500.000	150 keluarga	1.500.000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	"Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	150 keluarga	1.500.000	150 keluarga	1.500.000

		Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang				
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	150 keluarga	1.500.000	-	0
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 keluarga	1.500.000	100 keluarga	1.500.000
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50 keluarga	1.500.000	50 keluarga	1.500.000
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50 keluarga	1.500.000	50 keluarga	1.500.000
d	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase fasilitasi koordinasi	100%	24.355.000	100%	3.520.000

		Ketentraman dan Ketertiban Umum				
	<b>Kegiatan 1</b> Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah fasilitasi koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	2 fasilitasi	24.355.000	2 fasilitasi	3.520.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	"Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	3 laporan	24.355.000	3 laporan	3.520.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 laporan	3.600.000	-	0
e	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	7.200.000	100%	7.200.000
	<b>Kegiatan 1</b> Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 fasilitasi	7.200.000	1 fasilitasi	7.200.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	36 dokumen	7.200.000	36 dokumen	7.200.000
2	<b>. Sasaran 2</b> <b>Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa</b>	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa	88,89	25.590.000	94,44	15.990.000



		tepat waktu				
a	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu	100%	25.590.000	100%	15.990.000
		Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu	100%		100%	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu	88,89%		88,89%	
	<b>Kegiatan 1</b> Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	ersentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	25.590.000	100%	15.990.000
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6 dokumen	2.700.000	6 d0kumen	2.700.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 dokumen	9.000.000	6 dokumen	5.400.000

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 dokumen	3.240.000	6 dokumen	3.240.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 dokumen	1.800.000	-	0
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 dokumen	600.000	-	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 dokumen	1.350.000	-	0

	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 dokumen	6.900.000	1 dokumen	4.650.000
--	---	--	-----------	-----------	-----------	-----------

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

##### 3.1.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja baik triwulan maupun tahunan. Langkah pembandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Format pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja (Bernilai Positif), maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja (Bernilai Negatif), digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang digunakan skala ordinal nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja**

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
1.	> 90%	Sangat Tinggi
2.	> 75% - 90%	Tinggi
3.	> 65% - 75%	Sedang
4.	> 50% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Kecamatan Jatiroto adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Tahun 2024**

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Total	Capaian (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	61,50 (B-)	-	-	-	55.06	55.06	89,52
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	87,72 %	14,62 %	14,62 %	41%	87,72 %	87,72 %	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata - Rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	94,44 %	12,69 %	12,68 %	33%	94,44 %	100%	105%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

❖ **Tujuan :**

Indikator kinerja tujuan terealisasi sebesar 55.06 dengan capaian kinerja 89.52 %

❖ **Sasaran Strategis**

1. Indikator kinerja dengan capaian realisasi  $\geq 100\%$  sebanyak 2 indikator;
2. Indikator kinerja dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
3. Indikator kinerja yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

### 3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

#### 3.1.2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan target dengan realisasi Kinerja tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kinerjanya yang ditetapkan di tahun 2024.

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Jatiroto

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	61,5	55,06	<b>89,52</b>
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	87,72%	87,72%	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata - Rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	94,44%	100%	105%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian kinerja *Kecamatan Jatiroto tahun 2024* sebagai berikut :

#### Tujuan 1 : Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 61,5%

, terealisasi sebesar 55,06% dengan capaian 89,52% atau tergolong capaian kinerjanya tinggi.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{55,06}{61,5} \times 100 = 89,52\%$$

Sumber Data : Bagian Organisasi

### Sasaran Strategis 1 : meningkatnya penyelenggaraan pelayanan public di kecamatan

Sasaran stategis ini diukur dengan menggunakan indikator persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 87,72%

teralisasi sebesar 87,72%dengan capaian 100 % atau tergolong capaian kinerjanya tinggi

Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{87,77}{87,77} \times 100 \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Sumber data: Seluruh Seksi dan Seluruh Sub bagian Kecamatan Jatiroto

### Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa

Sasaran stategis ini diukur dengan menggunakan indikator Rata - Rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 88,89%, teralisasi sebesar 100%dengan capaian 112 % atau tergolong capaian kinerjanya tinggi.. Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{94,44} \times 100 \\ &= 105\% \end{aligned}$$

Sumber data: Kasi Pemerintahan

Jumlah desa yang menyusun RKPDes tepat eaktu ada 6 desa

Jumlah desa yang menyusun APBDes tepat waktu ada 6 desa

Jumlah desa yang menyusun LPPDes tepat waktu ada 6 des

Sedangkan target nya 4 desa,

Jadi kecamatan jatiroto sasaran meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa dengan indicator Rata - Rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sudah melebihi target.

### 3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja beberapa tahun terakhir dari sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023 (Berdasarkan Dokumen P-Renstra 2018-2023)**

NO	TUJUAN/SARAN	INDIKATOR	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Pelayanan Kecamatan Jatiroto	85,55	100	85,55	84	100	84	83,12	100	83,12	83,85	104	87,78	84,12	93,84	78,94
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	92	97	90	92,67	95,03	88	90	100	90	91,33	95,58	87,30	93,33	91,87	85,75
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	81,67	99,17	81	80	100	80	83,33	100	83,33	88,33	100	83,33	94,44	94,12	88,89

Ket :

- T = Target
- R = Realisasi
- C = Capaian



**Tabel 3.5**  
**Capaian Kinerja dari Tahun 2024 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2024-2026)**

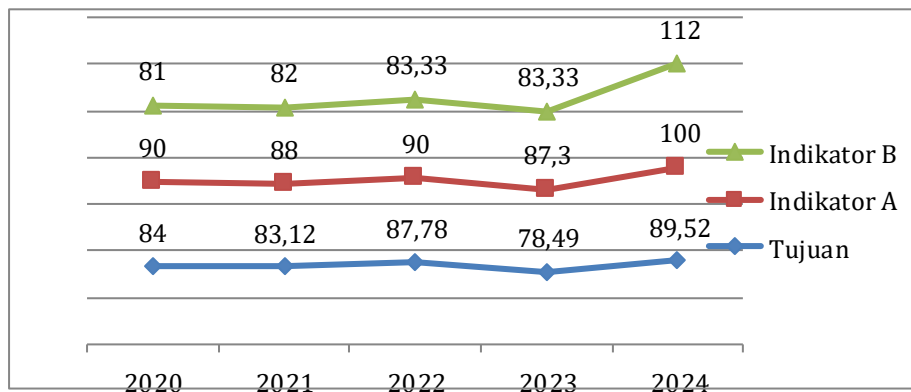
No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Keterangan	
			T	R	C		
1	Tujuan A Optimalnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	a	Indeks Pelayanan Publik	61,50	55.06	89,52	Sumber Bagian Organisasi
	Sasaran A Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	b	Indikator persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	87,72	87,72	100	Sumber Seluruh Seksi dan Seluruh Sub bagian
	Sasaran B Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	c	Indikator Rata - Rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	94,44	100	105	Sumber Seksi pemerintahan

Pada dokumen P-Renstra tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat dilihat bahwa kecamatan Jatiroto memiliki 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan 2 (dua) sasaran yaitu meningkatnya penyelenggaraan public di kecamatana dan meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa. Sedangkan pada dokumen Renstra Tahun 2024 – 2026, Kecamatan Jatiroto 1 (satu) tujuan yaitu Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan 2 (dua) strategis yaitu Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dan Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa yang perlu dicapai. Jika diperbandingkan kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya ada indicator yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu Indikator persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan Indikator Rata - Rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sebesar 20%.

Dari beberapa indikator yang berbeda dalam beberapa tahun tersebut maka bisa dibuat grafik perbandingan sebagai berikut:

**Gambar 2**

Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun ke Tahun



Dari grafik terlihat bahwa tujuan Optimalnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dari tahun 2020 sampai 2024 terdapat capaian penurunan pada tahun 2020 ke tahun 2021 dikarenakan 2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas, naik ditahun 2022 karena Pola kerja di Kantor Kecamatan Jatiroto yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, terjadi penurunan ditahun 2023 karena Belum terpenuhinya penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya, ditahun 2024 terjadi kenaikan lagi sebesar 10%. Karena Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman

**Untuk sasaran A** (Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan indikator persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti) dari tahun 2020 terjadi kenaikan ke 2021 1. Sarana dan prasarana yang sudah memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dari tahun 2021 terjadi penurunan sampai 2023 karena perubahan kebijakan dan regulasi yang tak terduga, dan di tahun 2024 ada kenaikan capaian sebesar 15 % karena Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi.

**Untuk sasaran B** (Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa Indikator Rata - Rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu) dari tahun 2020 sampai 2024 terjadi kenaikan sebesar 33,11% Karena rutin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen administrasi pemerintahan desa secara berkala..

### 3.1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Akhir renstra 2024 – 2026 :

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2024	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	61,50%(B- )	55,06%(C)	70,00%(B-)	78,65%
2	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	87,72%	87,72%	91,23%	96%
3	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata - Rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	94,44%	105%	94,44%	100%

Dari tabel terlihat bahwa realisasi kinerja tujuan Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan indikator Indeks Pelayanan Publik belum memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar dengan 70,00 untuk

**sasaran 1.** Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dengan indikator persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti belum memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar dengan 91,23%.

**Sasaran 2.** Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa Indikator Rata - Rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu belum memenuhi targer renstra 94,44.

### 3.1.2.4. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kecamatan yosowilangun

Perbandingan realisasi tahun ini dengan Kecamatan Lain tampak sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.7

#### Perbanding Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kecamatan Yosowilangun

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Kecamatan Yosowilangun	Capaian
e a l	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	61,50%(B- )	55,06%(C)	59,47%	89,43%
i s a s	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	87,72%	87,72%	87,30%	100%
i t u j	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata - Rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	94,44%	100%	100%	105%

tujuan Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan indikator Indeks Pelayanan Publik pada tahun ini jika dibandingkan dengan Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Jatiroto ditetapkan dalam tahun 2024 sebesar 55,06 atau diperbandingkan dengan nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lumajang 59,47, dengan karakteristik yang berbeda, capaiannya hal ini dikarenakan Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan dan langkah yang dilakukan adalah Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting .kependudukan

Realisasi Sasaran Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan indikator persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti jika dibandingkan dengan Kecamatan lain ditetapkan dalam tahun 2024 sebesar 87,72% atau diperbandingkan dengan Kecamatan Yosowilangun 87,30%dengan karakteristik yang sama capaiannya.

Realisasi sasaran meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa indikator Rata - Rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu dengan kecamatan lain dalam tahun 2024 sebesar 100% atau diperbandingkan dengan Kecamatan Yosowilangun 100% dengan karakteristik yang sama capaiannya.

### 3.1.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari pembahasan diatas dapat diketahui capaian tujuan /sasaran Kecamatan Jatiroto sebagian besar sudah memenuhi target dan ada beberapa indikator yang belum memenuhi target ,serta jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya maupun dari target kecamatan lain yang menjadi *benchmark*. Adapun hal itu tentunya tidak luput dari beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaiannya, antara lain sebagai berikut :

#### 1. Tujuan 1 : Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

Tujuan Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan indikator Indeks Pelayanan Publik , capaian kinerja tahun ini sebesar 89,43% (tidak tercapai) jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 2 % dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 78,65%,hal ini didukung dengan adanya :

- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- c. Persentase tindaklanjut fasilitas dan koordinasi terhitung tinggi

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Kurangnya kesadaran dan wawasan masyarakat dalam memahami setiap kebijakan.
- b. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan pada tujuan tersebut untuk mensosialisasikan kebijakan pada setiap kegiatan

#### 1. Sasaran Strategis 1 : meningkatnya penyelenggaraan pelayanan public di kecamatan

Sasaran meningkatnya penyelenggaraan pelayanan public di kecamatan Dengan indikator persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti , capaian kinerja tahun ini sebesar 87,72 % (tercapai), jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 2,1 % dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 78,65 %, hal ini didukung dengan adanya :

- a. Persentase tindaklanjut fasilitasi dan koordinasi terhitung tinggi

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Terbatasnya ketersediaan anggaran dan sarana prasarana

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut : menyusun kembali RKA dan mengusulkan penambahan anggaran

#### 2. Sasaran Strategis 2 : meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa

Sasaran meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa dengan indikator rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu capaian kinerja tahun ini sebesar 88,89 % (tercapai) sama dengan tahun sebelumnya. Meskipun demikian untuk kedepannya Kecamatan Jatiroto akan tetap melakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja diantaranya dengan menindaklanjuti fasilitasi dan koordinasi yang diterima dengan maksimal.

### 3.1.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Kecamatan Jatiroto didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kecamatan Jatiroto dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	89,43%	96,35%	(Rumus : capaian kinerja - % Penyerapan anggaran) 11,29%
	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	96,45%	3,55%
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata - Rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	105%	100%	0%

Pada Tabel 3.8 ditunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mendukung kinerja **tujuan** Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

pada Kecamatan Jatiroto tahun 2024 sebesar Rp. 1.77.336.193 dan realisasinya sebesar Rp. 1.713.542.193 sehingga penyerapan anggaran sebesar 96.35%. Pada Tabel 3.8 ditunjukkan bahwa Kecamatan Jatiroto dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 3,6% %, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai bahkan melebihi 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin.).

Sedangkan untuk untuk mendukung kinerja **sasaran pertama** Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan pada Kecamatan Jatiroto.tahun 2024 sebesar Rp.1.762.346.397 dan realisasinya sebesar Rp sehingga penyerapan anggaran sebesar 1.729.311.543. Pada Tabel 3.8 ditunjukkan bahwa Kecamatan Jatiroto dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 3,55 %, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti belum dapat tercapai. Dikarenakan adanya beberapa indicator kegiatan yang belum tercapai sepenuhnya, diantaranya kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang tercapai sebesar 98,07%, kegiatan penyedia Administrasi pelaksanaan tugas ASN sebesar 91,97%, kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar 92,61%, Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar 96,05, Kegiatan Penyedia Barang Cetak dan Pengadaan sebesar 96,01%.

Sedangkan untuk untuk mendukung kinerja **sasaran kedua** Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa pada Kecamatan Jatiroto.tahun 2024 sebesar 15,990,000 Pada Tabel 3.8 ditunjukkan bahwa Kecamatan Jatiroto dapat melakukan efisiensi anggaran sebesar 15,990,000 dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 105 %, hal ini dikarenakan indicator Rata - Rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu dapat tercapai bahkan melebihi 100%, namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin.

Efisiensi sumber daya selain dilihat dari anggarannya juga dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang kinerja tersebut. Jika dilihat pada dokumen analisa jabatan dan peta jabatan, total kebutuhan jabatan pada Kecamatan Jatiroto sebanyak 23 orang, kondisi saat ini jumlah personil ASN yang ada dalam mendukung capaian kinerja tahun 2024 sebanyak 12 dengan persentase pemenuhan kebutuhan jabatan sebesar 52,17 %. Meskipun demikian, keberadaan tenaga kontrak bulanan sebanyak 5 orang juga merupakan bagian dari dukungan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. Hal ini jika diperbandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun ini yang sebagian besar tidak tercapai maksimal, maka dapat dikatakan bahwa dengan jumlah SDM yang belum mampu untuk memenuhi target kinerjanya, Sedangkan untuk sumberdaya sarana dan prasarana, kondisi sarana dan prasarana pada Kecamatan Jatiroto yang ada saat ini dengan

kondisi baik 40 % rusak 10 % dan rusak berat 50 %. Jika diperbandingkan antara rata – rata capaian kinerja tahun 2024 dengan kondisi sumber daya sarana dan prasarana yang sebagian besar kondisinya rusak berat maka dapat dikatakan bahwa sumber daya sarana dan prasarana saat ini sudah cukup efisien atau perlu dilakukan penambahan dan pemenuhan.

### **3.1.2.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Jatiroto ditunjang oleh program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja tersebut. Adapun program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

**1. Tujuan 1 :** Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Indikator : Indeks Pelayanan Publik dengan target 61,50(B-) , realisasi 55,06%(C) dan capaiannya 89,43 %.tujuan tersebut belum tercapai dikarenakan belum optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan.

#### **Permasalahan**

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan
- Sarana dan Prasarana Pelayanan yang belum sepenuhnya memadai
- Pengelolaan BMD belum optimal
- Terbatasnya sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

didukung dengan 2 (dua) sasaran strategis :

**1. Sasaran 1 : meningkatnya penyelenggaraan pelayanan public di kecamatan**

Sasaran ini diukur dengan indikator persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti ditunjang oleh 5 program yaitu:

- 1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,** dengan kinerja sasaran program meningkatkan kualitas fasilitas kebutuhan operasional perkantoran yang diukur dengan indikator persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 98.05% sehingga capaiannya 98,05 %. Indikator program ini belum terealisasi sepenuhnya karena adanya beberapa kegiatan yang rendah capaiannya yaitu.
  - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :

- **Kegiatan**, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kinerja sasaran kegiatan Terfasilitasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator persentase fasilitas penyusunan dokumen kegiatan perencanaan, dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100 %. Hal ini tercapai karena hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat sehingga terciptanya suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- **Kegiatan** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya fasilitas Administrasi keuangan Perangkat daerah yang diukur dengan indikator persentase fasilitas administrasi keuangan perangkat daerah dengan target 100% dan realisasi 98,07% sehingga capaiannya 98,07 %. Hal ini belum tercapai karena kurangnya pemanfaatan sumber daya perencanaan baik hardware, software maupun brainware.
- **Kegiatan** Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan kinerja sasaran Terpenuhinya fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah dengan indikator persentase fasilitas administrasi barang milik daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100 %. Hal ini tercapai karena pola kerja di Kantor Kecamatan Jatiroto yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif..
- **Kegiatan** Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan kinerja sasaran Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah perangkat daerah. dengan target 100% dan realisasi 97,15% sehingga capaiannya 97,15 %. Hal ini belum tercapai karena kurangnya Kapasitas SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah kurang memadai
- **Kegiatan** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sasaran Terpenuhinya fasilitas jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator persentase fasilitas jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan target 100% dan realisasi 97,77% sehingga capaiannya 97,77 %. Hal ini belum tercapai karena kurangnya anggaran dan dana untuk menyediakan jasa penunjang.

- **Kegiatan** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sasaran Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indicator Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan target 100% dan realisasi 98,17% sehingga capaiannya 98,17 %. Hal ini belum tercapai karena belum maksimal dalam penyerapn anggaran.
2. **Program Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan public** dengan kinerja sasaran program Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100 %. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya kegiatan-kegiatan rutin yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Jatiroto Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 1 (satu ) kegiatan sebagai berikut :
- **Kegiatan** Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sasaran Meningkatnya kualitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan indicator Meningkatnya kualitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100 %. Hal ini tercapai karena fasilitasi dan koordinasi yang diterima sudah ditindak lanjuti.
3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Desa dan Kelurahan** dengan kinerja sasaran program Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa dengan indicator Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan Masyarakat dengan Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100 %. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya kegiatan-kegiatan rutin yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Jatiroto Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :
- **Kegiatan** Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sasaran Meningkatnya kualitas koordinasi kegiatan pemberdayaan desa kinerja dengan indicator Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Kegiatan** Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan sasaran Meningkatnya kualitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan indicator Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat

Kecamatan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100 %. Hal ini tercapai karena fasilitasi dan koordinasi yang diterima sudah ditindak lanjuti.

4. **Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum** dengan kinerja sasaran Meningkatnya kualitas fasilitasi koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indicator Persentase fasilitasi koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100 %. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya kegiatan-kegiatan rutin yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Jatiroto Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- **Kegiatan** Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum dengan sasaran Meningkatnya kualitas fasilitasi koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum dengan indicator Jumlah fasilitasi koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100 %. Hal ini tercapai karena didukung dengan aktifitas dan dokumen yang telah terlaksana.

5. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** dengan sasaran kinerja Meningkatnya kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indicator Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100 %. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya kegiatan-kegiatan rutin yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Jatiroto Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- **Kegiatan** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sasaran Kinerja Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diukur dengan indicator Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100 %. Hal ini tercapai karena didukung dengan aktifitas dan dokumen yang telah terlaksana.

## 2. Sasaran 2 : meningkatkan akuntabilitas Desa

Sasaran ini diukur dengan indikator rata-rata desa yang Menyusun dokumen administrasi pemerintah desa tepat waktu ditunjang oleh 1 program yaitu

1. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** dengan kinerja sasaran program meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di ukur dengan indicator Persentase Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu, Persentase Desa yang menetapkan APBdes tepat waktu, Persentase Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu. Target untuk indicator ini 94,44% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 105%. Indicator program ini dapat terealisasi karena adanya kegiatan-kegiatan Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen administrasi pemerintahan desa secara berkala yang telah dilaksanakan oleh kecamatan jatiroto. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 kegiatan sebagai berikut.
  - **Kegiatan** Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sasaran kinerja Meningkat nya kualitas Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang di ukur dengan indicator persentase fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa dengan target 94,44% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 105%. Hal ini tercapai karena Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen administrasi pemerintahan desa secara berkala.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Kecamatan Jatiroto tahun 2024 adalah sebesar Rp 1,778,996,397- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp1,713,542,193-, atau sebesar 96,35%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9

Realisasi Anggaran 2024

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten / Kota	1.707.501.397	1.674.216.543	98.05
2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	2.250.000	2.250.000	100
3.	Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	41.875.000	41.875.000	100
4.	Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	3.520.000	3.520.000	100
5.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.200.000	7.200.000	100
6.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	15.990.000	15.990.000	100
	<b>Total</b>	<b>1.778.336.397</b>	<b>1.713.542.193</b>	<b>96,35</b>

### 3.2.1. INOVASI

Pada tahun 2024 Kecamatan Jatiroto telah melakukan inovasi untuk menunjang kinerja antara lain :

NGOBROL SANTAI KOORDINASI LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BINWAS DESA DAN INFORMASI (NGOBRAS KLAMBI)

- **Keadaan Masalah yang ada**

Banyaknya kegiatan yang harus dikerjakan di Desa sebagai leading sektor Pemerintahan serta Kondisi Permasalahan di desa tidak sama antara desa satu dengan yang lain menjadi kendala Desa dalam memenuhi Administrasi yang ada di Desa. Kegiatan Bimbingan dan Pengawasan yang dilakukan Kecamatan secara Prosedural kurang efektif dalam mendorong efektifitas Desa memenuhi time schedule yang diterapkan baik itu perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban. Hal ini tentunya menjadi kendala dalam menjalankan sistem Pemerintahan yang baik dan Berintegritas.

- **Inovasi untuk mengatasi keadaan atau masalah**

Berkaca dari Kekurangan kami di tahun sebelumnya dimana bahkan Dokumen Perencanaan baru diserahkan di awal tahun berikutnya, Maka Dari semua latar belakang masalah tersebut diatas, OPD Kecamatan Jatiroto membuat Inovasi berupa Ngobrol Santai Koordinasi Layanan Administrasi Pemerintahan Binwas Desa dan Informasi (Ngobras Klambi). Adapun tahapan kami dalam membentuk Inovasi Ngobras Klambi ini antara Lain:

1. Melakukan Pendekatan ke desa dengan mendatangi masing masing kantor Desa .
2. Melakukan pemetaan masalah di tiap tiap desa yang tidak sama untuk di diskusikan bersama nantinya .
3. Membuat grup WA Forum Komunikasi antar desa dan Kecamatan yang khusus di dalamnya para Sekretaris Desa sebagai motor penggerak kegiatan di Desa dan Juga Tenaga Pendamping Desa .
4. Melakukan Pendekatan secara emosional dengan membuat kegiatan arisan anjongsana kerumah Sekretaris Desa yang nantinya di dalamnya akan dibahas Program Kegiatan sesuai time schedule serta Informasi terbaru yang harus diketahui oleh Desa.
5. Melibatkan Tenaga Pendamping Profesional dan Tenaga Pendamping Desa ikut dalam anjongsana guna menyampaikan informasi informasi aturan terbaru, Misal nya program prioritas sesuai Kemendesa atau Aturan pencairan DD dan ADD ataupun capaian Progres Desa.
6. Menetapkan batas waktu pengumpulan dokumen dokumen sesuai kesepakatan bersama di dalam anjongsana.

- **Penanganan Masalah setelah diterapkan inovasi**

Setelah dilakukan inovasi Obras Klambi ini Desa mampu dan bisa menyelesaikan Administrasi pemerintahan baik itu Perencanaan, Penganggaran dan juga

Pertanggungjawaban. Informasi terbaru yang disampaikan oleh Pendamping Desa turut juga menjadi faktor pendukung untuk Desa Desa mencapai kesepakatan yang sama. Jadi tidak ada lagi disinformasi antara Desa yang satu dan yang lain, sehingga tercipta gotong royong antar desa, saling membantu apabila Desa lainnya ada kendala dan salah satu pencapaian yang dirasakan sampai dengan hari ini yaitu kami mampu menyelesaikan dokumen perencanaan tepat waktu di bulan September.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun 2024 (LKJiP) Tahunan adalah bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam merealisasikan rencana-rencana yang telah disusun dalam Renstra (Rencana Strategis) dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan rencana serta upaya antisipatif dalam meminimalisir permasalahan yang ada.

Kecamatan selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lumajang belum dapat melaksanakan kewenangan sepenuhnya, hal ini dikarenakan dalam penyusunan Program dan Kegiatan belum mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi, sehingga beberapa tugas pokok dan fungsi tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan analisis capaian kinerja Kecamatan Jatiroto Tahun 2024, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti sebesar 87,72%
2. Rata – rata persentase penyusunan dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sebesar 94,44%

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024, maka tindak lanjut dan upaya yang dapat dilaksanakan pada masa mendatang sehingga dapat mempertahankan dan / atau meningkatkan kinerja, sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti fasilitasi dan koordinasi yang diterima secara maksimal.
2. Mengoptimalkan koordinasi dan Kerjasama internal dalam kegiatan pencapaian indicator kinerja.
3. Mengoptimalkan koordinasi internal tim Binwas Desa.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan 2022 (LKJiP) Kecamatan Jatiroto disusun, meskipun masih jauh dalam kaidah – kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik dan masukan konstruktif demi menyempurnakan LKJiP ini. Semoga LKJiP ini dapat bermanfaat khususnya untuk OPD Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang



## LAMPIRAN

- ❖ **DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA (MURNI DAN PERUBAHAN)**
- ❖ **MATRIK TUJUAN, SASARAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**
- ❖ **DOKUMENTASI KEGIATAN**
- ❖ **DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KUTUM HADI KASIYAN, S.H.

Jabatan : CAMAT JATIROTO

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.

Jabatan : Pj. BUPATI LUMAJANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Pertama

KUTUM HADI KASIYAN, S.H.  
NIP. 19680407198903 1 006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN JATIROTO KABUPATEN LUMAJANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	87,72%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata - Rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	88,89%


Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.823.606.126,00	Sumber DAU
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	9.000.000,00	Sumber DAU
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	144.655.000,00	Sumber DAU
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	24.355.000,00	Sumber DAU
5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000,00	Sumber DAU
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.590.000,00	Sumber DAU
<b>JUMLAH</b>	<b>2.034.406.126,00</b>	

Pj. BUPATI LUMAJANG

  
**INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.**

Lumajang, 10 Januari 2024

CAMAT JATIROTO

  
**KUTUM HADI KASIYAN, S.H.**  
NIP. 19680407198903 1 006



### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KUTUM HADI KASIYAN, SH

Jabatan : Camat Jatiroto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
  
**INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si**  


Lumajang, 02 September 2024  
Pihak Pertama,  
  
**KUTUM HADI KASIYAN, SH**  
NIP. 19680407 198903 1 006  


**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
OPD KECAMATAN JATIROTO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	87,72
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	94,44

Program		Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.707.501.397
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 2.250.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 41.875.000
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 3.520.000
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 7.200.000
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.990.000
<b>JUMLAH</b>		Rp. 1.778.336.397

  
 Pj. BUPATI LUMAJANG  
  
INDAH WAHIDNI, S.H., M.Si

Lumajang, 02 September 2024  
 CAKUPAN JATIROTO  
  
KUTUM TIADI KASIYAN, SH  
 NIP. 19680407 198903 1 006

Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024	
						Target	Rp
2	3	4	5	6	7	8	9
Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Persen	<i>Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100</i>	100%	100%	1,687,677,916
<i>Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persen</i>	<i>Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</i>	0%	100%	8,500,000

				<i>yang direncanakan dikali 100</i>			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	2,500,000
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4,500,000
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1,500,000

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	1,500,000
Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	9 Laporan	2,000,000
<b>Terpenuhinya fasilitas Administrasi keuangan Perangkat daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas administrasi keuangan Perangkat daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>Jumlah fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dibutuhkan dikali 100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1,020,407,916</b>
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Jumlah ASN/ Bulan	10 Orang/ 12 Bulan	11 Orang/12 Bulan	988,831,916



Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	27,576,000
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1,500,000
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5 Laporan	2,500,000
<b>Terpenuhinya fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>Jumlah fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>5,000,000</b>

Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2,500,000
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah ...	Laporan	Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	2,500,000
<b>Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>Jumlah fasilitas Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	- Paket		
<b>Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>Jumlah fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>99,500,000</b>

				<b>yang direncanakan dikali 100</b>			
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	3,500,000
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	2 Paket	3 Paket	35,000,000
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	5 Paket	12,500,000
Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan Material	- Paket	1 Paket	2,000,000
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	- Laporan	12 Laporan	3,500,000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	45,000,000

<b>Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan dikali 100</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>88,500,000</b>
Tersedianya Alat Besar	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Alat Besar	- Unit	1 Unit	45,000,000
Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	- Unit	3 Unit	43,500,000
<b>Terpenuhinya fasilitasi jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>Jumlah fasilitasi jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dikali 100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>236,270,000</b>
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	12 Laporan	50,000,000

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa pelayanan Kantor Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor yang Disediakan	Laporan Jasa Umum yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Umum	12 Laporan	12 Laporan	186,270,000
<b>Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan pemeliharaan dikali 100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>229,500,000</b>
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	40,000,000
Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan perizinannya	- Unit		-
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	25 Unit	14,500,000

Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Unit	1 Unit	175,000,000
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	Persen	Jumlah pelayanan PATEN yang dilaksanakan sesuai SP dan SOP dibagi Jumlah pelayanan yang diajukan oleh masyarakat dikali 100	0%	100%	20,233,000
<i>Meningkatnya kualitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan</i>	<i>Persen</i>	<i>Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang direncanakan x 100</i>	0%	100%	15,733,000
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Dokumen	6 Dokumen	15,733,000

<b>Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persen</b>	<b>Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan dibanding Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dikali 100</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>4,500,000</b>
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Laporam	1 Dokumen	4,500,000
<b>Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat</b>	<b>Persen</b>	<b>Jumlah (persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa + Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan) dibagi 2</b>	<b>87.50%</b>	<b>100%</b>	<b>124,822,000</b>

<b>Meningkatnya kualitas koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa</b>	<b>Persen</b>	<b>jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang direncanakan dikali 100</b>	<b>87.50%</b>	<b>100%</b>	<b>82,072,000</b>
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2,500,000
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	- Dokumen	1 Dokumen	4,500,000



Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10 Laporan	75,072,000
<b>Meningkatnya kualitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>Jumlah Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang direncanakan x 100</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>42,750,000</b>
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	- Keluarga	150 Keluarga	6,750,000
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	- Keluarga	150 Keluarga	6,750,000

Berdaya Saing							
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	- Keluarga	150 Keluarga	6,750,000
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	- Keluarga	100 Keluarga	4,500,000

Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	- Keluarga	75 Keluarga	6,750,000
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	- Keluarga	50 Keluarga	4,500,000
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	- Keluarga	150 Keluarga	6,750,000
<b>Meningkatnya kualitas fasilitasi koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase fasilitasi koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persen</b>	<b>Jumlah Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>27,733,000</b>

<b>Meningkatnya kualitas fasilitasi koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum</b>	<b>Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah fasilitasi koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum</b>	<b>Fasilitasi</b>	<b>Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan</b>	<b>0 Fasilitasi</b>	<b>2 Fasilitasi</b>	<b>27,733,000</b>
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Laporan	1 Laporan	23,233,000
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	- Laporan	6 Laporan	4,500,000
<b>Meningkatnya kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persen</b>	<b>Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>7,200,000</b>

				Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100			
<b>Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan</b>	<b>1 Fasilitas</b>	<b>1 Fasilitas</b>	<b>7,200,000</b>
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	7,200,000
<b>Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu</b>	<b>Persen</b>	<b>Jumlah desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100</b>	<b>83.00%</b>	<b>100%</b>	<b>121,022,000</b>
		<b>Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu</b>	<b>Persen</b>	<b>Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

		Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100	66.67%	66.67%	
<b>Meningkatnya kualitas Fasilitas , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Fasilitas , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Fasilitas , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persen</b>	<b>Jumlah Fasilitas , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitas , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang direncanakan dikali 100</b>	<b>5 Desa</b>	<b>89%</b>	<b>121,022,000</b>
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	N/A	6 Dokumen	12,500,000
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	6 Dokumen	12,522,000

Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	- Dokumen	6 Dokumen	12,500,000
Terlaksananya Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	- Laporan	6 Laporan	10,000,000
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	- Dokumen	6 Dokumen	9,500,000
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	N/A		-
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	N/A	6 Dokumen	10,500,000

Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	N/A	1 Dokumen	7,500,000
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	N/A	6 Dokumen	11,000,000
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	N/A	6 Laporan	35,000,000





Penanggulangan anak tidak sekolah



Kunjungan forkopimda dalam rangka pilkada 202



Sosialisasi tindak pidana pemilihan



Pembagian honor RT/RW Desa Sukosari



Kunjungan ke TPS dalam rangka pilkada 2024



penilaian dalam rangka lomba kampung resik di Desa Banyuputih Kidul



Apel Linmas dalam Rangka Pelaksanaa Poilkada Tahun 2024



Apel Pengamanan dan Penertipan Alat Peraga Kampanye (APK) Jelang Pelaksanaan Pilkada 2024



Mendampingi Kepala Desa Kaliboto Lor dan Kepala Desa Rojopolo dalam rangka Penerimaan Piagam Bagi Desa yang Lunas Pajak



Pembagian Bantuan Langsung Tunai DD di Desa Sukosari



Musyawarah Desa dalam rangka Penetapan APBDesa tahun 2025 di Desa Kaliboto Kidul



Musyawarah Desa dalam rangka Penetapan APBDesa tahun 2025 di Desa Sukosari



Kunjungan Koramil Jatiroto terkait Pendataan Akte Kelahiran



Pembagian BLT DBHCHT bagi buruh atau tenaga kerja pabrik rokok di Desa kaliboto kidul



Sosialisasi Program Ketahanan Pangan di Desa Kaliboto Lor



Pembagian Bantuan Langsung Tunai DD di Desa Kaliboto Kidul



Pembagian Bantuan Sembako di Desa Sukosasri



Pembagian Bantuan Sembako di Desa Kaliboto Lor



Operasi Pasar Murah di Desa Kaliboto Kidul



Pembagian Bantuan langsung tunai (BLT DD) di Desa Rojopolo



Apel Pengamanan dalm rangka pergantian tahun baru 2025



Upacara rutin tiap hari Senin di halaman Kantor Kecamatan Jatiroto

